



# JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Jurnal Majelis, Edisi 06, September 2020

ISSN : 2085-4862

## ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

- Takdir Ali Mukti** | Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia
- Hadza Min Fadhli Robby** | India-Indonesia Dan Masa Depan Samudera Hindia
- Dafri Agussalim** | Dari Traditional Security ke Non-Traditional Security: Evolusi Konsep Keamanan dan Relevansinya Bagi Upaya Penguatan Ketahanan dan Keamanan Nasional Indonesia
- Agus Haryanto** | Konsepsi Peran Indonesia di Asia Tenggara
- Ade M Wirasenjaya** | Regionalisme Baru Asia Tenggara dan Agenda Revitalisasi Kepemimpinan Indonesia di Kawasan
- Muhadi Sugiono** | Geopolitik Asia dan Tantangan Diplomasi Struktural Indonesia
- Siti Mutiah Setiawati** | Perjuangan Diplomasi Kemaritiman Indonesia Menuju Keamanan dan Perdamaian Regional dan Dunia
- M. Indrawan Jatmika** | Penanggulangan Terorisme Siber Sebagai Ancaman Keamanan  
**Arindha Nityasari** | Negara Non-Tradisional Bagi Indonesia
- Nuriyeni Kartika Bintarsari** | Isu-Isu Keamanan dan Prioritas Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia
- Hestutomo Restu Kuncoro** | Kebijakan Luar Negeri dan Potensi Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Tidak  
Diperjualbelikan



# **JURNAL MAJELIS**

## **Media Aspirasi Konstitusi**

### **Arah Kebijakan Politik Luar Negeri**

Badan Pengkajian MPR RI

---

2020

## Susunan Dewan Redaksi

**Penasehat** : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A  
Dr. Ahmad Basarah, M.H  
H. Ahmad Muzani  
Lestari Moerdijat, S.S., M.M  
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA  
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A  
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A  
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M  
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M  
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

**Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S  
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si  
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H  
Ir. H. Tifatul Sembiring  
Fahira Idris, S.E., M.H

**Penanggung Jawab** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H  
**Pemimpin Redaksi** : Drs. Yana Indrawan, M.Si.  
**Redaksi Pelaksana** : Agip Munandar, S.H., M.H  
Andrianto, S.E  
Abdul Rafiq, SE  
Euis Karmilah, S.IP

**Editor** : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M; Bernadetta  
Widyastuti, S.Sos; Elias Petege, S.HI;  
Emmy Marlia Sari, S.AB.; Otto Trengginas  
Setiawan, S.Hum

**Sekretariat** : Dennys Advenino Pulo, S.H.  
Encep Sunjaya, S.S.

### Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : [biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id](mailto:biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id) / [biro.pengkajian@gmail.com](mailto:biro.pengkajian@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar Redaksi	III
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	V
Politik Paradiplomasi Pemerintah Republik Indonesia <i>Takdir Ali Mukti</i>	1
India-Indonesia Dan Masa Depan Samudera Hindia <i>Hadza Min Fadhli Robby</i>	21
Dari Traditional Security ke Non-Traditional Security: Evolusi Konsep Keamanan dan Relevansinya Bagi Upaya Penguatan Ketahanan dan Keamanan Nasional Indonesia <i>Dafri Agussalim</i>	41
Konsepsi Peran Indonesia di Asia Tenggara <i>Agus Haryanto</i>	71
Regionalisme Baru Asia Tenggara dan Agenda Revitalisasi Kepemimpinan Indonesia di Kawasan <i>Ade M Wirasenjaya</i>	99
Geopolitik Asia dan Tantangan Diplomasi Struktural Indonesia <i>Muhadi Sugiono</i>	119
Perjuangan Diplomasi Kemaritiman Indonesia Menuju Keamanan dan Perdamaian Regional dan Dunia <i>Siti Mutiah Setiawati</i>	137
Penanggulangan Terorisme Siber Sebagai Ancaman Keamanan Negara Non-Tradisional Bagi Indonesia <i>Muhammad Indrawan Jatmika, Arindha Nityasari</i>	165
Isu-Isu Keamanan dan Prioritas Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia <i>Nuriyeni Kartika Bintarsari</i>	197
Kebijakan Luar Negeri dan Potensi Sektor Ekonomi Digital Indonesia <i>Hestutomo Restu Kuncoro</i>	213

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)



## Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 6 Tahun 2020 dengan tema bahasan “Arah Kebijakan Politik Luar Negeri” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Arah Kebijakan Politik Luar Negeri” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel dalam jurnal ini berupaya membahas berbagai tantangan keamanan secara global yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Prioritas politik luar negeri Indonesia akan lebih efektif apabila difokuskan pada isu-isu keamanan, baik keamanan tradisional maupun non-tradisional. Artikel ini ditulis untuk membantu para pengambil kebijakan di Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memilih prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 6 Tahun 2020 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks “Arah Kebijakan Politik Luar Negeri” dengan merujuk berbagai pengalaman atau peristiwa yang terjadi di Indonesia guna menjawab tantangan-tantangan dan dinamika politik ke depan.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



## **Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar "Arah Kebijakan Politik Luar Negeri". Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan kebijakan prioritas politik luar negeri Indonesia sebagai kekuatan yang dominan di kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri merupakan kebijakan yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan agenda-agenda nasional bangsa Indonesia ke depan. Arah kebijakan politik luar negeri harus dijalankan dan terlaksana dengan

baik, karena pertaruhan dari kebijakan ini adalah keberlangsungan suatu bangsa dan bagaimana bangsa tersebut dapat bertahan di tengah arus globalisasi modern saat ini.

Oleh karena itu, menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu. Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI  
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

## KONSEPSI PERAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA

Oleh: Agus Haryanto  
 Departemen Hubungan Internasional  
 Universitas Jenderal Soedirman  
 Email: [agus.haryanto@unsoed.ac.id](mailto:agus.haryanto@unsoed.ac.id)

### ABSTRAK

Indonesia telah menempatkan ASEAN sebagai konsentris pertama dalam politik luar negeri sejak masa pemerintahan Soeharto. Namun demikian, Indonesia mengalami pasang surut penilaian atas keputusan ini. Pada awal reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri. Namun, seiring pemulihan dalam ekonomi dan stabilitas politik, Indonesia kembali menempatkan ASEAN sebagai prioritas politik luar negeri. Atas perubahan - perubahan prioritas tersebut, tulisan ini berusaha untuk menelusuri bagaimana Indonesia di Asia Tenggara dengan tinjauan konsepsi peran. Konsepsi peran adalah seperangkat “ego” atau kepribadian negara. Dengan menggali konsepsi peran Indonesia, maka tulisan ini berusaha untuk menemukan kepribadian Indonesia dalam berinteraksi di Asia Tenggara. Tulisan ini ditulis dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tulisan ini menemukan tiga konsepsi peran yang dimiliki Indonesia di Asia Tenggara yaitu bebas aktif, pemimpin di kawasan, dan mediator.

**Kata kunci:** Indonesia, ASEAN, Asia Tenggara, Konsepsi Peran, dan politik luar negeri

### ABSTRACT

*Indonesia has placed ASEAN as the first concentric in foreign policy since the Soeharto era. However, Indonesia experienced ups and downs in the assessment of this decision. At the beginning of the reform, Indonesia no longer placed ASEAN as a priority in foreign policy. However, as the*

*recovery in the economy and political stability, Indonesia again places ASEAN as a foreign policy priority. For these priority changes, this paper seeks to explore how Indonesia in Southeast Asia with a review of the conception of roles. Role conception is a set of “ego” or state personalities. By exploring the conception of the role of Indonesia, this paper seeks to discover the personality of Indonesia in interacting in Southeast Asia. This paper was written with a descriptive-analytical method. Based on the research conducted, this paper found three conceptions of the role that Indonesia has in Southeast Asia, namely independent and active, leaders in the region, and mediators.*

**Keywords:** *Indonesia, ASEAN, Southeast Asia, Role Conception, and foreign policy*

## A. PENDAHULUAN

Sejak Menlu Adam Malik menyatakan ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia, perdebatan muncul mengenai apakah kepentingan Indonesia terakomodasi dengan kebijakan ini. Di Era Soeharto, ASEAN menempati lingkaran pertama dalam politik luar negeri. Namun, pada Era Reformasi, beberapa pihak mempertanyakan tentang relevansi penempatan ASEAN sebagai lingkaran pertama politik luar negeri Indonesia. Dengan berbagai perkembangan isu dan perubahan kepemimpinan, prioritas - prioritas politik luar negeri dapat berubah. Situmorang (2015) memberikan contoh pandangan Rizal Sukma yang menyatakan figur demokrasi menjadi elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kepemimpinan di ASEAN dan peran dalam politik global adalah mengelola isu domestik yaitu konsolidasi demokrasi, dampak nasionalisme terhadap politik luar negeri, dan dimensi Islam.<sup>1</sup>

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Auliya dan Sulaiman (2019) yang menyatakan Indonesia memerlukan ASEAN untuk berperan lebih besar di politik global. Hal ini dapat dilihat dari konsep Poros Maritim

1 Mangadar Situmorang. “Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK”. Jurnal Hubungan Internasional UNPAR (2015): 67-85, hlm

Dunia (PMD) yang telah diusung oleh pemerintahan Joko Widodo dan konsep Indo pasifik. Dalam konsep indo pasifik yang dibuat oleh Indonesia, ternyata masih sentralitas ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan.<sup>2</sup> Beberapa pengkaji yang lain seperti Djelantik (2016) menyoroti mengenai isu keamanan maritim di ASEAN dikaitkan dengan peran Indonesia di dalamnya. Sebagai negara dengan wilayah perairan terluas, Indonesia dituntut untuk memiliki perhatian yang besar dalam isu ini, sekaligus menunjukkan pada masyarakat internasional bahwa persoalan keamanan maritim di Asia Tenggara tidak memerlukan campur tangan negara luar kawasan.<sup>3</sup>

Memang kalau kita membaca kembali sejarah perjalanan politik luar negeri, prioritas politik luar negeri selalu berubah. Prioritas politik luar negeri di era Soekarno, sebagai contoh, adalah memperoleh pengakuan dunia internasional atas kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno mengutus para diplomat kita untuk melakukan komunikasi secara bilateral untuk memperoleh pengakuan. Selain itu, langkah kedua yang dilakukan Soekarno adalah memperoleh dukungan dari banyak negara melalui forum internasional. Soekarno tidak begitu tertarik ide pembentukan organisasi di kawasan Asia Tenggara karena cakupannya terlalu sempit. Soekarno lebih tertarik untuk bertemu dengan forum yang dihadiri banyak negara. Maka, Soekarno memilih menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.<sup>4</sup>

Soeharto memiliki konsep yang berbeda dengan Soekarno dalam konteks politik luar negeri. Soeharto mewarisi politik luar negeri Soekarno yang *high profile* tetapi berdampak pada persoalan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia. Kemudian, beberapa kebijakan Soekarno seperti keluar dari PBB, konfrontasi dengan Malaysia, dan konsep Nefo - oldefo telah membuat kepercayaan dunia internasional turun. Oleh karena itu, prioritas Soeharto dalam politik luar negeri adalah memperoleh kepercayaan internasional. Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, bergabung kembali ke PBB,<sup>5</sup> dan membentuk organisasi regional Asia

2 Putri Auliya & Yohanes Sulaiman, "Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrum" *Global Cakra & Strategis*. Thn 13, No 1 (2019): 79-90, hlm 86-87

3 Sukawarsini Djelantik. "Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan". *Global & Strategis*, Th. 10, No.2 (2016): 186-203, hlm 199

4 Agus Haryanto & Isman Pasha. 2016. *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu) hlm 88-92

5 Ibid, hlm 133

Tenggara, ASEAN.

Dengan berbagai perubahan prioritas politik luar negeri Indonesia, tulisan ini bermaksud membahas mengenai adakah konsepsi peran Indonesia di Asia Tenggara. Konsepsi peran merupakan istilah yang dimunculkan Holsti (1970), dimana menurutnya negara memiliki “self/ego” atau kepribadian dalam menjalankan politik luar negeri. Selama ini, para pengkaji politik luar negeri lebih banyak menganalisis kebijakan - kebijakan yang muncul dari negara, tetapi tidak menganalisis lebih dalam mengenai seperangkat kepribadian negara. Oleh karena itu, jika peneliti menggali konsepsi peran, maka peneliti akan dapat memprediksi kemungkinan kebijakan - kebijakan yang akan diambil negara dalam memahami kasus tertentu.

Selama ini, para pengkaji sebenarnya telah menggunakan tipologi untuk menganalisis perilaku politik luar negeri Indonesia. Nugroho (2013) misalnya, membahas mengenai bagaimana tipologi politik luar negeri berdasarkan periode pemerintahan. Nugroho (2013) membahas secara khusus tipe politik luar negeri di era reformasi. Nugroho (2013) menggunakan pendekatan neoklasik untuk memetakan tipologi politik luar negeri. Menurutnya, PLNRI di era reformasi memang pada awalnya inkonsisten, *disoriented*, atau *no profile*. Tapi kemudian, kajian yang dilakukan Nugroho (2013) menunjukkan PLNRI memiliki empat varian yaitu aktif, populis masif, pseudo-populis, dan non-populis.<sup>6</sup>

## B. KONSEPSI PERAN NASIONAL

Konsepsi peran nasional diungkapkan oleh K.J. Holsti pada tahun 1970 dalam tulisannya yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*”. Menurut Holsti (1970), sebuah kelaziman para pengkaji menyematkan karakteristik perilaku sebuah negara misalnya negara pemimpin, negara penyeimbang, atau negara pengekor dalam sistem internasional.<sup>7</sup> Holsti (1970) menganggap pengkategorian perilaku

6 Bambang Wahyu Nugroho. “*Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi*” Jurnal Hubungan Internasional UMY, Vol. 2, No 1 (April 2013): 75-82, hlm 80

7 K.J. Holsti.1970. “*National role Conceptions in the Study of Foreign Policy*”. International Studies Quarterly volume 14. Number 3 (Sept 1970):

negara, pada saat itu terlalu sederhana karena hanya memiliki kategori yang sedikit, yaitu kategori yang menyangkut perilaku negara - negara besar saja. Selain itu, kategori yang dibuat juga terlalu bertumpu pada perang dingin.

Holsti (1970) mengajukan contoh sederhana mengenai kelemahan pengkategorian yang muncul pada waktu itu yaitu penyebutan Blok Barat atau Blok Timur, kemudian menyebut negara lain sebagai negara netral. Menurutnya, pengkategorian ini merupakan klasifikasi yang tidak mewakili bagaimana perilaku negara – negara kecil di Afrika, Asia dan Amerika Latin, kecuali negara – negara di wilayah tersebut memang secara terus terang menjadi bagian dari rivalitas perang dingin. Lebih lanjut, Holsti pun mempertanyakan ketika sebuah negara dimasukkan sebagai anggota salah satu kutub atau blok, apakah negara tersebut benar – benar memiliki prinsip yang sama dengan anggota yang lain?<sup>8</sup>

Secara sederhana, Holsti (1970) menganggap kebijakan sebuah negara merupakan hasil dari konsepsi peran nasional yang dimiliki negara tersebut, digabungkan dengan saran atau nilai – nilai yang seharusnya diadopsi sebuah negara. Para pengambil kebijakan memiliki konsepsi yang bersumber dari lokasi (letak) negara, sumber daya dan kemampuan sosial ekonomi, nilai – nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, *personality*, dan kebutuhan politik. Holsti menganggap pengambil kebijakan memiliki “ego” dalam membuat keputusan berdasarkan konsepsi yang dimiliki. Tetapi, Holsti tidak mengabaikan kemungkinan persepsi itu “bergeser” karena konsepsi tersebut juga dipengaruhi oleh status negara yang dipimpin dan saran atau nilai – nilai yang seharusnya dianut negara tersebut seperti perjanjian internasional, opini masyarakat internasional, pemahaman informal, prinsip – prinsip internasional, dan peraturan umum yang berlaku.

Holsti menggali lebih dalam mengenai konsepsi peran. Menurutnya, tindakan yang diambil negara sebenarnya dapat diprediksi oleh para pengamat jika mereka mampu menangkap konsepsi peran negara tersebut. Padahal, tindakan sebuah negara belum tentu mencerminkan kepribadian negara tersebut. Negara dapat bertindak dalam tekanan negara lain atau dalam situasi krisis. Oleh karena itu, untuk menganalisis politik luar negeri

8 Ibid, hlm 234-235

sebuah negara seharusnya para pengkaji mulai meneliti konsepsi peran yang dimiliki negara. Konsepsi peran sebuah negara merupakan sumber utama kebijakan luar negeri sehingga dengan mengetahui konsepsi peran sebuah negara, kita dapat menganalisis perilaku negara dalam berbagai situasi.

Holsti (1970) mengemukakan tujuh belas tipe konsepsi peran nasional yang merupakan komponen kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu: (1) *Bastion of Revolution, Liberator*, (2) *Regional Leader*, (3) *Regional Protector*, (4) *Active Independent*, (5) *Liberation Supporter*, (6) *Anti-Imperialist agent*, (7) *Defender of the Faith*, (8) *Mediator-Integrator*, (9) *Regional - Subsystem Collaborator*, (10) *Developer*, (11) *Bridge*, (12) *Faithful ally*, (13) *Independent*, (14) *Example*, (15) *Internal Development*, (16) *Isolate* dan (17) *Other Role*.<sup>9</sup>

Kajian mengenai konsepsi peran setelah Holsti, bertumpu pada empat pertanyaan utama yaitu bagaimana penggunaan level analisis, apakah sebuah negara dapat memiliki lebih dari satu peran, berapa lama sebuah negara memiliki peran tertentu kemudian berganti ke peran yang lain, dan apakah teori peran dapat digunakan dengan teori lain.<sup>1011</sup>

Pertama, mengenai level analisis. Pada awalnya konsepsi peran yang dikemukakan oleh Holsti (1970) memang menggunakan level individu (pemimpin negara). Namun saat ini, konsepsi peran dapat mewakili tindakan negara. Ada beberapa penelitian seperti Lisbet Aggestam dalam tulisannya yang berjudul "*Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy*".<sup>12</sup> Aggestam (1999) meneliti lebih jauh bagaimana konsepsi peran tiga negara di Uni Eropa yaitu Jerman, Inggris dan Prancis dalam integrasi Uni Eropa. Pertanyaan utama dalam penelitian tersebut adalah apakah mereka (Jerman, Inggris, dan Prancis) menjadi promotor

9 Ibid, hlm 261-272

10 Stephen G Walker. 2013. "Binary Role Theory and Uncertainty Problem in International Relations Theory". Melalui <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/walker.pdf> yang diakses pada 20 April 2020 pukul 09:00

11 Cameron G Thies. 2009. "Role Theory and Foreign Policy". Melalui <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf> yang 20 April 2020 pukul 9:00

12 Lisbet Aggestam. "Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy". Makalah dalam ARENA Center for European Studies Working Paper nomor 99/8. 1999. Melalui : [http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenapublications/workingpapers/working-papers1999/wp99\\_8.htm](http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenapublications/workingpapers/working-papers1999/wp99_8.htm) yang diakses pada 26/06/2013 pukul 12:30

konsepsi peran nasional mereka dalam integrasi atau menjadi promotor nilai – nilai yang disepakati Uni Eropa bagi negara masing – masing.

Identitas kolektif menunjukkan ide keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial menuntut adanya keseragaman sikap dan orientasi, namun di dalamnya dimungkinkan adanya orientasi dan tindakan pribadi. Vertzberger (dalam Aggestam, 1999) mendefinisikan kultur sebagai sekumpulan identitas kolektif yang diakui oleh individu. Dalam konteks politik luar negeri, kultur dapat dimaknai sebagai kepercayaan umum dan sikap sama yang ditunjukkan beberapa negara dengan mengabaikan diri mereka sendiri dan aktor lain dalam arena internasional. Jadi, politik identitas merujuk pada sekumpulan ide tentang komunitas politik dimana pembuat kebijakan menggunakan dan mendesain kohesi dan solidaritas untuk melegitimasi tindakan mereka dalam politik luar negeri.<sup>13</sup>

Kedua, apakah negara dapat memiliki lebih dari satu peran? Sebenarnya sejak awal sudah dikemukakan oleh Holsti bahwa negara dapat memiliki lebih dari satu peran, tetapi bukan peran yang kontradiktif. Namun, kini beberapa pengkaji seperti Thies (2009) menyatakan mungkin saja negara memiliki peran yang kontradiktif atau berpindah. Negara akan melakukan penyesuaian dan berubah dari satu peran ke peran lain. Proses adaptasi ini akan menyulitkan pengamat mengenai bagaimana negara tersebut menyelesaikan *interrole conflict*.<sup>14</sup>

Ketiga, pertanyaan lain yang mengemuka adalah berapa lama sebuah negara memiliki satu peran dan berganti menjadi peran yang lain. Dalam hal ini, sebuah negara akan memiliki peran baru dan meninggalkan peran lama seiring dengan interaksinya dalam masyarakat internasional. Sebuah negara dapat saja memilih peran untuk diri mereka sendiri dan berproses mengumumkannya kepada negara lain melalui mengambil “tanggung jawab” dari peran baru yang dimiliki.

Keempat, apakah konsepsi peran dapat disandingkan dengan teori lain? Beberapa penelitian menyatakan teori peran dapat digunakan dengan teori lain. Sebagai contoh konsepsi yang ditulis Aggestam (1999)

---

13 ibid

14 Thies, Cameron G. 2009. “Role Theory and Foreign Policy”. Makalah di workshop universitas Iowa. Dapat diakses melalui <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf> yang diakses pada 20 April 2020 pukul 9:00

mengenai konsepsi peran tiga negara di Eropa yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris dikaitkan dengan teori integrasi kawasan. Apakah konsepsi peran yang kuat akan membuat integrasi kawasan berjalan lebih lambat?

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan tipologi konsepsi peran yang diungkapkan oleh Holsti (1970) untuk mengidentifikasi perilaku negara. Jika kita membagi konsepsi yang dibuat oleh Holsti, maka enam konsepsi peran nasional yang diutarakan Holsti adalah tipikal peran negara dalam perang dingin. Mereka adalah *faithful ally, anti-imperialist agent, defender of the faith, bastion of the revolution, regional protector and protectee*. Ada pula peran negara yang sama sekali tidak berorientasi pada perang dingin, yaitu *independent, active independent, mediator-integrator, bridge and isolate*. Kemudian, ada beberapa konsepsi yang berkaitan dengan peran negara dalam kawasan, yaitu *liberation supporter, regional subsystem collaborator, developer, internal development and example*.

### **C. INDONESIA DI ASIA TENGGARA: DARI SOEKARNO KE JOKOWI**

Asia Tenggara menjadi wilayah yang penting dalam diskusi politik luar negeri Indonesia. Dari tabel 1 di bawah ini, tercatat beberapa inisiatif Indonesia di Asia Tenggara berdasarkan tahun.

**Tabel 1**  
**Peran Indonesia di Asia Tenggara berdasarkan Tahun**

1967	Salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN
1971	Berperan penting dalam penerapan ZOPFAN ( <i>Southeast Asian Zone of Freedom, and Neutrality</i> ) dan NFZ ( <i>southeast Asia Nuclear Free Zone</i> )
1976	Pada KTT ASEAN di Bali Indonesia mengusulkan terbentuknya kerja sama keamanan dan latihan militer bersama
1979	menyediakan pulau Galang di Riau untuk menampung pengungsi konflik Vietnam
1981	Presiden Soeharto mengingatkan pada ASEAN bahwa konflik Kamboja adalah sengketa antara Vietnam dan Tiongkok, bukan antara ASEAN dan Vietnam
1980-an	Indonesia ikut berperan penting dalam membendung pengaruh Tiongkok dan Uni Soviet
1984	Menlu Vietnam Nguyen Co Thach mengakui hanya Indonesia yang mampu menjembatani ASEAN dan Indochina dalam menyelesaikan masalah Kamboja
	Indonesia menyatakan kepada PBB bahwa solusi untuk masalah Kamboja adalah terbentuknya negara Kamboja yang berdaulat
1987	Indonesia mengirim satuan tugas TNI Angkatan laut ke Filipina untuk membantu pengamanan KTT ASEAN
1988	Memprakarsai terbentuknya <i>Jakarta Informal Meeting (JIM)</i> dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja
1992	Mengirim pasukan perdamaian ke Kamboja untuk mencegah konflik
1993	Menjadi penengah antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro
1995	Berperan aktif dalam pembentukan <i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i>
2003	Memperjuangkan dimasukkannya elemen-elemen penting dalam demokratisasi dan penghormatan serta penegakan HAM dalam kerja sama politik dan keamanan
2004	Mengusulkan pembentukan Komunitas ASEAN ( <i>ASEAN Community</i> ) yang mencakup bidang keamanan, sosial budaya dan ekonomi
2007	Menyusun dan menandatangani <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)</i> sebagai upaya peningkatan kerja sama pencegahan dan

<p>penanggulangan terorisme          Menyelenggarakan ASEAN Forum sebagai dukungan terwujudnya Komunitas ASEAN 2015          2011          Ratifikasi traktat kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selama Indonesia menjadi ketua ASEAN          Menengahi sengketa bilateral Kamboja dan Thailand dalam perebutan kuil Preah Vihear          2012          Mengusulkan draft Nol Kode Tata Berperilaku atau <i>Code of Conduct</i> (CoC) Laut Tiongkok Selatan untuk mempercepat penyelesaian sengketa</p>
---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Namun demikian, jika merujuk pada periodisasi presiden, Indonesia telah mengalami pasang surut persepsi mengenai bagaimana Indonesia di Asia Tenggara. Pada Era Soekarno, perhatian terhadap politik di kawasan Asia Tenggara muncul “hanya” untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperoleh pengakuan internasional. Presiden Soekarno memandang pentingnya kerja sama yang luas daripada kerja sama regional. Hal ini terlihat dari surat balasan presiden Soekarno kepada PM Malaysia Tunku Abdul Rahman yang mengajak Indonesia bergabung dalam *Association of Southeast Asia* (ASA). Soekarno menyatakan bahwa meskipun kerja sama yang erat di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu hal yang penting dan diinginkan, namun mendirikan organisasi baru merupakan suatu penghalang. Sebagai alternatif, Soekarno ingin lebih mengembangkan kontak bilateral dan mendorong kerja sama multilateral dalam bingkai Afro-Asia.<sup>15</sup>

Sementara kondisi Asia Tenggara saat itu, beberapa negara memiliki kontak dengan negara di luar kawasan untuk membentuk aliansi, misalnya *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) yang diikuti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Menurut Indonesia, SEATO merupakan salah satu bentuk dibawahnya perang dingin ke kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama ini sangat kental dengan campur tangan asing di dalam negeri.

Sikap Indonesia ini menunjukkan pada kita bahwa Indonesia menginginkan negara-negara di Asia Tenggara tidak mengundang pihak luar

15 Agus Haryanto & Isman Pasha. *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek*. (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2016)

kawasan untuk menyelesaikan persoalan di kawasan. Sikap ini, dilanjutkan Indonesia di masa Soeharto dalam menyikapi konflik Kamboja. Munculnya aktor di luar kawasan yang terlibat dalam konflik Kamboja telah membuat ASEAN sulit menemukan formula bersama dalam mengakhiri konflik Kamboja. Pada saat itu, negara-negara ASEAN memiliki sikap berbeda dalam pencarian jalan keluar untuk konflik ini. Indonesia dan Malaysia mengusahakan penyelesaian konflik ini dengan mekanisme regional. Sikap Indonesia dan Malaysia ini dikenal dengan Deklarasi Kuantan tahun 1980. Dalam deklarasi tersebut Malaysia meminta Vietnam untuk bersikap netral dan bebas dari pengaruh baik Uni Soviet maupun Tiongkok. Sedangkan negara-negara selain itu menginginkan penyelesaian konflik Kamboja melalui mekanisme internasional yaitu mengundang pihak-pihak di luar kawasan untuk membantu penyelesaian konflik. Termasuk memberikan sanksi terhadap Vietnam jika memang Vietnam tidak mau menarik pasukannya. Menurut Acharya (2001) Indonesia menunjukkan diri sebagai pemimpin politik di kawasan dalam konteks konflik Kamboja. Pada saat itu, Indonesia ditunjuk menjadi *interlocutor* oleh ASEAN. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai *interlocutor* resmi bagi ASEAN, maka semua negosiasi berkaitan dengan Kamboja dan Vietnam akan dilakukan oleh Indonesia.<sup>16</sup>

Melanjutkan kebijakan Soekarno, Soeharto memiliki pandangan Asia Tenggara sebagai wilayah yang penting dalam politik luar negeri Indonesia. Pemikiran Soeharto terhadap Asia Tenggara terlihat dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tahun 1966 yang menghasilkan langkah pembuatan kebijakan politik luar negeri yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak barat dan “*good neighbourhood policy*” melalui organisasi regional di Asia Tenggara (ASEAN). Pembentukan ASEAN secara langsung memberikan dampak positif dalam normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia – Filipina karena pada waktu itu ketiga negara merupakan anggota ASEAN. Bagi Indonesia, langkah normalisasi ini diperlukan untuk stabilitas kawasan yang nantinya akan menunjang pembangunan ekonomi.<sup>17</sup> Selain itu, dalam deklarasi ASEAN 1967, Indonesia menolak adanya pangkalan asing di wilayah

16 Acharya, Amitav. 2011. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order*, 2<sup>nd</sup> Edition. (New York: Routledge), hlm 87

17 Wuryandari, Ganewati et.al. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. (Yogyakarta & Jakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), hlm 115-116

Asia Tenggara.<sup>18</sup> Jika Pun ada pangkalan asing, diperkenankan hanya sebagai pangkalan sementara saja. Usulan ini untuk menghindari ancaman terhadap negara-negara di Asia Tenggara sekaligus mengurangi hambatan bagi Indonesia untuk berperan dalam bidang keamanan di kawasan.<sup>19</sup>

Orde Baru memberikan penekanan khusus kerjasama di ASEAN dengan adanya TAP MPR tahun 1973. Isi ketetapan tersebut adalah: (1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi; (2) Mengambil langkah – langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara; (3) Mengembangkan kerja sama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.

Presiden Soeharto juga mengeluarkan Petunjuk presiden pada 11 April 1973 sebagai perincian TAP MPR di atas yang isinya: (1) Memperkuat dan mempererat kerja sama antara negara-negara dalam lingkungan ASEAN; (2) Mempererat persahabatan dan memberi isi yang lebih nyata terhadap hubungan bertetangga baik dengan tetangga-tetangga Indonesia; (3) Mengembangkan setiap unsur dan kesempatan untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara; (4)

---

18 Seperti diketahui, aliansi tradisional yang ada di Asia Tenggara pasca-Perang Dunia II mendominasi kawasan ini. Saat ASEAN didirikan, Thailand dan Filipina merupakan anggota Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO. SEATO merupakan pakta pertahanan kolektif yang dipimpin AS untuk membendung komunisme di Asia Tenggara dan didirikan pada tanggal 8 September 1954. Dalam SEATO, negara-negara tersebut bekerja sama dalam bidang militer. Thailand tercatat menyediakan pangkalan militer untuk pasukan AS saat berlangsung Perang Vietnam. Filipina juga menyediakan pangkalan militer bagi AS. Sementara itu, dua negara ASEAN lainnya, Singapura dan Malaysia, memiliki perjanjian *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) yang berhubungan dengan Inggris dan Australia. Lihat lebih lanjut dalam Agus Haryanto dan Isman Pasha, *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek* di Bab 7 bagian kerja sama ASEAN

19 Prihatyono, Agus. *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia tenggara melalui ASEAN Security Community*. (Jakarta : Tesis FISIP UI, 2009), hlm 90

Membina persahabatan dengan negara-negara dunia pada umumnya serta mengusahakan peranan yang lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah dunia di lapangan ekonomi dan politik, untuk memperkuat kerjasama antara bangsa-bangsa dan perdamaian dunia; (5) Bersama-sama negara berkembang lainnya memperjuangkan kepentingan bersama untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dalam GBHN tahun 1978-1983, GBHN tahun 1983-1988, dan GBHN tahun 1988-1993, Indonesia menetapkan ASEAN sebagai prioritas dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.<sup>20</sup>

Peran Indonesia dalam perkembangan ASEAN adalah adanya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation (TAC) melalui Bali Concord I*. Prinsip tersebut adalah (1) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan derajat, integritas teritorial, dan identitas nasional semua bangsa; (2) hak masing-masing negara untuk hidup bebas dari campur tangan, subversi, atau paksaan; (3) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain; (4) penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai; (5) berjanji untuk tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan; (6) mengadakan kerjasama efektif di kalangan ASEAN. Di situ terlihat, prinsip non-intervensi kembali ditekankan sebagai salah satu prinsip hubungan intra-ASEAN.<sup>21</sup>

Pada tahun 1980an, Soeharto menempatkan ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama dalam politik luar negerinya. Persoalan regional dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berperan aktif dalam persoalan regional seperti menjadi penengah atas ketegangan antara Malaysia dan Singapura tahun 1986 sebagai akibat dari kunjungan presiden Israel Chaim Herzog ke Singapura. kemudian membantu penyelesaian konflik Vietnam dan Kamboja dalam Konflik Kamboja melalui *Jakarta Informal Meeting* tahun 1980.

Namun demikian, Indonesia kehilangan kepercayaan diri di dunia internasional setelah tumbangny orde baru. Kondisi domestik yang penuh

20 Gunadirja, et al. 1998. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1960-1965 (Buku IVB)*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1996)

21 Secara eksplisit disebutkan “non-interference in the internal affairs of one another”. Lihat, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, dalam <http://www.aseansec.org/TAC-KnowledgeKit.pdf>.

gejolak politik dan krisis ekonomi membuat Indonesia lebih memfokuskan untuk memperbaiki kondisi dalam negeri. Dengan demikian, persepsi bahwa Indonesia adalah pemimpin di ASEAN pun dipertanyakan.<sup>2223</sup> Selain itu, penempatan ASEAN sebagai konsentris pertama dalam politik luar negeri juga dievaluasi.

Pada awal reformasi, Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang spesial dalam politik luar negeri. Pada masa pemerintahan Habibie, Habibie lebih disibukkan dengan pemulihan stabilitas nasional. Sementara pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, politik luar negeri Indonesia menekankan hubungan dengan banyak negara dan tidak memberikan perhatian khusus kepada ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri. Bahkan, tercatat momen dimana Abdurrahman Wahid memandang ASEAN tidak menjadi pilar utama politik luar negeri dengan dirinya mengusulkan dibentuknya *West Pacific Forum* pada tahun 2000. Pada waktu itu, Abdurrahman Wahid mengusulkan adanya forum tersebut dalam pertemuan ASEAN+3 di Singapura.

Kemudian, pada masa Megawati Soekarno Putri, Indonesia kembali menempatkan ASEAN dalam konsentris pertama dalam politik luar negerinya. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era Megawati mengacu pada TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang dalam Bab IV tentang Arah Kebijakan khususnya tentang Hubungan Luar Negeri menekankan poin, “meningkatkan kerja sama dalam segala bidang, dengan negara berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan”. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di ASEAN di era Megawati memiliki catatan keberhasilan peran penting Indonesia di ASEAN seperti keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2003-2004. Dalam keketuaan Indonesia ini, Indonesia berhasil mengusulkan pembentukan *ASEAN Security Community* (ASC) pada KTT Bali bulan Oktober 2003. Kesepakatan ini kemudian dikenal sebagai *Bali Concord II* yang menyatakan komitmen politik negara - negara anggota ASEAN untuk menjadi *ASEAN Community* pada tahun 2015.

---

22 Wuryandari, Ganewati et.al. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. (Yogyakarta & Jakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), hlm 191

23 Antony Smith. 1999. *Indonesia's Role in ASEAN: The End of Leadership?*. contemporary Southeast Asia, Volume 21, Number 2, (Agustus 1999), hlm 244

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan bahwa konsep ASC yang diajukan oleh Indonesia adalah untuk mereformasi *state of mind* ASEAN guna lebih menyeimbangkan kerjasama yang selama ini lebih menekankan kerjasama ekonomi kepada kerjasama menciptakan stabilitas keamanan. ASC merupakan kerjasama yang ideal di dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, melalui ASC Indonesia berharap dapat kembali memiliki peran *strategic centrality* di dalam ASEAN dan pada gilirannya ASEAN akan berperan sebagai *diplomatic centrality* di dalam komunitas internasional.<sup>24</sup> Keberhasilan Indonesia menempatkan kembali posisi kepemimpinan di ASEAN menjadi modal tambah bagi peningkatan politik luar negeri Indonesia di level global.

Kebijakan Megawati dilanjutkan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era kepemimpinan SBY, Indonesia mempersepsikan dirinya sebagai “*a peace-maker, confidence-builder, problem-solver, dan bridge-builder*” (Laksmna, 2011: 161).<sup>25</sup> Persepsi ini diutarakan oleh SBY pada tahun 2005 setelah dirinya terpilih menjadi presiden. Dengan harapan persepsi ini, Indonesia menginginkan dirinya untuk ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan internasional melalui strategi yang dibangun di masa pemerintahan SBY.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat terlihat di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY kembali menekankan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri dan menempatkan ASEAN sebagai konsentris pertama. Konsentris kedua ditempati oleh ASEAN+3 (Jepang, RRC, Korea Selatan). Konsentris selanjutnya baru wilayah dan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia.

Di kawasan Asia Tenggara, SBY membawa peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan dengan berbagai inisiatifnya. Salah satu warisan yang dapat kita lihat adalah kepemimpinan Indonesia dalam merumuskan *Bali Concord III*. Dokumen ini menegaskan kembali kesepakatan *Bali Concord II* dengan menjabarkan *ASEAN Security Community* ke dalam

<sup>24</sup> Agus Prihatyono. *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia Tenggara melalui ASEAN Security Community*. (Jakarta : Tesis FISIP UI, 2009), hlm 2

<sup>25</sup> Evan A Laksmna., “Indonesia’s Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?”. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 2 (2011): 157-182, hlm 161

tiga pilar yaitu *ASEAN Economic Community* (AEC), *ASEAN Political and Security Community* (APSC), dan *ASEAN Social and Cultural Community* (ASCC). Dengan ketiga pilar ini, ASEAN dapat melanjutkan proses integrasi kawasan dan memberikan peran dalam politik global.

Kemudian, pada masa Joko Widodo, presiden mendelegasikan kebijakan politik luar negerinya kepada para penasehat dan orang-orang terdekatnya. Beberapa penasehat presiden memiliki pandangan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak memiliki kaitan langsung dengan kepemimpinan atau peran Indonesia dalam forum regional. Jokowi berusaha untuk menaikkan level peran Indonesia dalam politik global dengan “poros maritim dunia”. Namun demikian, menurut Auliya dan Sulaiman (2019), Indonesia tetap memerlukan ASEAN untuk berperan dalam politik global. Sebagai contoh Indonesia tetap menggunakan sentralitas ASEAN sebagai salah satu upayanya untuk mewujudkan konsep indo-pasifik.

Oleh karena itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan lima arah politik luar negeri, yakni: (1) penanganan perbatasan; (2) pemantapan peran Indonesia di ASEAN; (3) penguatan Diplomasi Ekonomi; (4) peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan warga negara/bahan hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI); dan (5) peran Indonesia dalam kerja sama global. Indonesia juga tetap melanjutkan peran-peran di ASEAN seperti upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dengan pembahasan *Code of Conduct*.

### **C. KONSEPSI PERAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA**

Jika merujuk pada bagaimana kategorisasi konsepsi peran Indonesia di Asia Tenggara, penulis menemukan tiga konsepsi peran yang seringkali muncul dalam politik luar negeri Indonesia di Asia Tenggara yaitu konsepsi peran bebas aktif, pemimpin kawasan dan mediator. Adapun munculnya peran ini dapat dilihat dari tindakan presiden selama menjabat.

**Tabel 2. Konsepsi Peran Indonesia di Asia Tenggara berdasarkan Periodisasi Presiden**

o	Periode Presiden	Konsepsi Peran		
		Bebas Aktif	Pemimpin Kawasan	Mediator
	Soekarno	-Tidak menyetujui pakta pertahanan (SEATO)	-	-
	Soeharto	-Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS	-Pendiri ASEAN -Bali Concord I	-Memediasi Konflik Kamboja
	BJ Habibie	-	-	-
	Abdurrahman Wahid	-	-	-
	Megawati	-	-Bali Concord II - Memperjuangkan isu demokrasi dan HAM dalam piagam ASEAN	-
	SBY	-mendorong penyelesaian konflik Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS	Bali Concord III	-Memediasi konflik Candi Preah Vihear
	Joko Widodo	- mendorong penyelesaian konflik Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS	-	-single draft COC Laut China Selatan

### 1. Bebas Aktif

Amitav Acharya (2015), mengomentari politik luar negeri Indonesia dengan menyatakan “*Every nation’s foreign policy and international role has a foundation, which often dates back to its beginnings as an independent nation*”. Acharya menempatkan prinsip bebas aktif sebagai tumpuan utama dalam politik luar negeri Indonesia.<sup>26</sup>

Prinsip bebas aktif telah digunakan sejak awal kemerdekaan. Munculnya prinsip ini dilandasi dari latar belakang sejarah Indonesia yang pernah mengalami sebagai negara jajahan. Untuk itu, Indonesia

<sup>26</sup> Amitav Acharya. *Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power*. (World Scientific Publishing: Singapura, 2015) hlm 5

menginginkan dirinya menjadi negara yang merdeka, tidak menjadi bagian dari kolonialisme. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan menjadi penguat nasionalisme. Beberapa negosiasi dengan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, seperti dengan Perjanjian Linggarjati yang memecah belah Indonesia, membuat pemimpin Indonesia menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1949 juga mempengaruhi cara pandang pemimpin Indonesia terhadap sistem internasional.<sup>27</sup> Meskipun demikian, penerapan prinsip bebas aktif dalam setiap periode pemerintahan tidak selalu sama. Sikap bebas aktif Indonesia di Era Soekarno di Asia Tenggara diterapkan dengan penolakan Soekarno atas pembentukan pakta militer di Asia Tenggara dan menyebutnya sebagai bagian dari neo kolonialisme.

Hein (dalam Wirayuda, 2014) menyatakan ada lima pilar filosofis dan legal yang mendukung keberlangsungan prinsip bebas aktif. Pilar pertama adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan dasar legal bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Prinsip dasar politik luar negeri tertuang dalam UUD 1945 seperti Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Pilar kedua, kepentingan nasional. kepentingan nasional Indonesia tertuang dalam UUD 1945. Selain itu, secara kontemporer, pemerintah menyatakan kepentingan nasional melalui UU, GBHN, atau peraturan pemerintah yang lain. Selanjutnya pilar ketiga adalah tidak terikat dalam salah satu blok dimana Indonesia menjadi pendiri GNB. Pilar keempat adalah Pancasila. Pilar kelima adalah persatuan nasional. Kelima pilar ini membuat Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya.<sup>28</sup>

Dengan demikian, meskipun setiap periode pemerintahan memiliki prioritas yang berubah, sikap Indonesia sebagai negara yang bebas aktif tidak akan berubah. Prinsip ini akan dijalankan Indonesia dalam politik luar negeri di Asia Tenggara maupun menjadi usulan-usulan Indonesia untuk ASEAN bersikap dalam percaturan politik global.

Sebagai contoh Indonesia mendorong sentralitas ASEAN dalam

27 Paige Johnson Tan. 2007. "Navigating A Turbulent Ocean: Indonesia's Worldview and Foreign Policy". *Asian Perspectives* (2007), hlm 149-151

28 Muhammad Hadianto Wirayuda. 2014. *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management*. (London: Disertasi di London School of Economics and Political Science, 2014) hlm 93-98

penyelesaian persoalan-persoalan di kawasan seperti Konflik Kamboja di Era Soeharto, Konflik Kamboja - Thailand mengenai Candi Preah Vihear di masa SBY, dan konflik Laut China Selatan di Era Soeharto sampai Jokowi. Indonesia memandang ASEAN sebagai pemersatu bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memiliki kesepahaman dalam penyelesaian sengketa. Dalam kondisi ASEAN memiliki kesepahaman, maka prinsip bebas Indonesia terwujud dengan tidak adanya intervensi negara – negara luar kawasan.

## 2. *Pemimpin Kawasan*

Dengan membaca luas wilayah Asia Tenggara, jumlah penduduk, dan posisi strategis dan Sumber Daya Alam (SDA) jika dibandingkan dengan Indonesia, maka sebagian pengamat menyebut Indonesia adalah pemimpin alami di Asia Tenggara.<sup>29</sup> Dalam konteks keaktifan Indonesia dalam berbagai inisiatif di kawasan, Indonesia menempatkan diri sebagai negara dengan inisiatif yang digunakan oleh kawasan. Kita bisa berkaca pada *Bali Concord I* di era Soeharto, *Bali Concord II* di era Megawati, dan *Bali Concord III* di era SBY. Ketiganya merupakan momen-momen pembentukan integrasi Asia Tenggara.

---

29 Ralf Emmers. "Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership". *The Pacific Review* Vol. 27, No. 4, (2014)543-562, hlm 155

## **Rangkuman Transformasi ASEAN melalui *Bali Concord***

---

### **Bali Concord I (1976)**

Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa; setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campur tangan, subversi, dan kekerasan dari kekuatan luar; tidak mencampuri urusan dalam negara lain; menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai; menolak ancaman penggunaan kekerasan.

### **Bali Concord II (2003)**

**Politik dan Keamanan:** Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, antara lain penyelesaian konflik kawasan secara damai, menjamin kawasan Asia Tenggara bebas nuklir, serta mencegah terorisme dan kejahatan transnasional.

**Ekonomi:** Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN tahun 2020 (yang kemudian dipercepat 2015), dan menuju kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif.

**Sosial Budaya:** Pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Memperkokoh solidaritas sesama warga ASEAN. Saling dukung dalam mengatasi kemiskinan, kesetaraan, dan pembangunan manusia.

### **Bali Concord III (2011)**

Politik dan Keamanan: Penyelesaian konflik kawasan Laut Tiongkok Selatan; pemberantasan kejahatan transnasional; perompakan; pemberantasan korupsi; mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir.

Ekonomi: Partisipasi dalam perekonomian global; penguatan kapasitas ekonomi ASEAN; adopsi standar produksi dan distribusi komoditas; perbaikan akses dan teknologi; investasi agrikultur; diversifikasi energi.

Sosial Budaya: Didirikan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Center); kesepakatan identitas kultural “Deklarasi Persatuan dalam Perbedaan ASEAN: Menuju Perkuatan Komunitas ASEAN”; persoalan pekerja migran (mengatasi perbedaan sudut pandang); penanganan dampak iklim kebakaran hutan; isu-isu HAM.

---

Diolah oleh Penulis

Memang ada momen dimana kepemimpinan Indonesia di ASEAN pasca krisis 1997/1998. Namun patut dicatat bahwa pada waktu itu, ASEAN pun jatuh pada posisi ketiadaan pemimpin karena integrasi kawasan Asia Tenggara yang melemah. Anthony Smith (1999) dalam tulisannya “*Indonesia’s Role in ASEAN: The End of Leadership?*” mempertanyakan mengenai bagaimana kepemimpinan Indonesia di ASEAN pasca krisis 1997. Smith menganggap Indonesia merupakan pemimpin di ASEAN yang “terancam” kehilangan kepemimpinannya karena krisis. Hal ini didasari dari partisipasi Indonesia yang menurun dalam berbagai isu internasional, termasuk di Asia Tenggara melalui ASEAN. Smith, secara spesifik, menyebut Indonesia “*has played a large part in the growing uncertainty surrounding Southeast Asia*”.<sup>30</sup> Smith (1999) menganggap

30 Anthony Smith. *Indonesia’s Role in ASEAN: The End of Leadership?*. contemporary Southeast Asia, Volume 21, Number 2, (Agustus 1999) , hlm 242

Indonesia telah berhasil membawa ASEAN melalui berbagai tantangan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh adalah tantangan untuk menambah jumlah anggota ASEAN. Perbedaan pendapat dalam pertemuan ASEAN keenam pada Desember 1998 mengenai keinginan Kamboja untuk masuk menjadi anggota ASEAN telah diselesaikan dengan menerima Kamboja sebagai bagian dari ASEAN. Padahal, pada waktu itu Singapura, Thailand, dan Filipina menolak untuk penambahan anggota ASEAN. Namun, dengan krisis 1997 yang melanda Indonesia, Smith mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk memimpin ASEAN.

Seiring dengan membaiknya perekonomian dan stabilitas nasional, Indonesia kembali menempatkan ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama dalam politik luar negeri. Indonesia, sejak era Megawati, secara perlahan kembali menjadi pemimpin di ASEAN. Sejak saat itu, Indonesia terlibat dalam penyelesaian isu-isu krusial di Asia Tenggara. Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif penyelesaian konflik Laut China Selatan dan isu-isu krusial yang memerlukan respon cepat. Sebagai contoh isu keketuaan Myanmar dalam pergiliran ketua ASEAN tahun 2014.

Dalam isu keketuaan Myanmar, Indonesia mengusulkan dilaksanakannya pergiliran keketuaan sebagaimana disepakati oleh ASEAN. Isu keketuaan Myanmar menjadi isu hangat pada sejak tahun 2010 karena Myanmar divonis oleh Barat sebagai negara yang anti demokrasi dan anti HAM. Padahal, ASEAN merupakan negara yang menjunjung dua prinsip ini. Pada waktu itu, pemerintah Myanmar menekan gerakan demokrasi di negaranya, termasuk menahan tokoh pro demokrasi, Aung San Suu Kyi.

Sebenarnya, situasi ini pernah dihadapi oleh ASEAN ketika menerima Myanmar sebagai anggota ASEAN. Pada waktu itu, negara-negara Barat menekan ASEAN agar menolak Myanmar. Oleh karena itu, proses masuknya Myanmar menjadi anggota ASEAN sangat alot. Tekanan itu kembali mengemuka saat ASEAN akan menunjuk Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN tahun 2014.

Namun, Indonesia mengusulkan agar pergiliran keketuaan di ASEAN dilakukan secara normal sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Indonesia menganggap telah terjadi perubahan signifikan di Myanmar

ke arah yang lebih demokratis. Indonesia juga menganggap keketuaan Myanmar di ASEAN dapat membuka dan mendorong pemerintahan negeri itu dalam menuntaskan proses demokratisasi. Pada waktu itu, Myanmar dianggap telah menunjukkan konsistensinya menjalankan tujuh peta jalan reformasi yang disusun oleh pemerintah Myanmar sendiri. Alasan lainnya adalah, keketuaan Myanmar di ASEAN akan membuat Myanmar menjadi sorotan dunia internasional dan membantu memastikan apakah Myanmar betul-betul meneruskan perubahan ke arah yang lebih baik.

Persoalan mengenai kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi bagian dari dinamika politik dalam negeri Indonesia sejak era kemerdekaan sampai saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Weinstein (1972) telah mengulas mengenai bagaimana para pemimpin negara memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan posisi Indonesia di Asia Tenggara. Weinstein yang mengajukan pertanyaan kepada 53 pemimpin negara mengenai peran Indonesia di Asia Tenggara mendapatkan jawaban 53 persen (28 orang) merasa Indonesia harus segera memiliki peran di Asia Tenggara, kemudian 36 persen (19 orang) merasa perlu memiliki peran tetapi tidak segera, dan 11 persen (6 orang) menyatakan kepemimpinan di Asia Tenggara tidaklah penting.<sup>31</sup>

Meskipun telah mengetahui bahwa Indonesia secara natural adalah pemimpin di ASEAN, namun perhatian mengenai bagaimana Indonesia memimpin ASEAN sejak tahun 1967 tidak mendapatkan perhatian yang besar. Padahal, Indonesia telah mencatatkan diri sebagai pemimpin dengan berbagai kebijakan yang mendorong perkembangan ASEAN sebagai sebuah institusi regional (Emmers, 2014). Meski demikian, kepemimpinan Indonesia disebut oleh Emmers sebagai “*incomplete leadership*” karena “*resistance from some ASEAN members to its preference for an autonomous regional order and in recent years for a democratic form of domestic governance*”. Lebih lanjut, Emmers menjelaskan kepemimpinan Indonesia hanya terbatas pada sektor politik dan keamanan saja. Indonesia “belum berani” untuk memimpin ASEAN dalam isu – isu krusial seperti ketahanan energi.

---

31 Franklin bernard Weinstein. *The Uses of Foreign Policy in Indonesia*. Disertasi di Universitas Cornell (1972), hlm 380-382

### 3. Mediator

Selama ini Indonesia dapat mengambil inisiatif memprakarsai penyelesaian konflik *intrastate* dan *inter-state* di kawasan. Indonesia berpartisipasi aktif dalam *Jakarta Internal Meeting* (JIM) I dan JIM II bagi penyelesaian konflik dan rekonsiliasi internal di Kamboja, persetujuan perdamaian 1996 di Filipina Selatan, konflik Thailand Selatan, Candi Preah Vihear, dan tetap aktif dalam penyusunan *Code of Conduct* Laut Cina Selatan. Salah satu ciri mediasi yang dikedepankan Indonesia adalah menekankan pada *conflict management* berbasis perdamaian dan berkomitmen pada penggunaan langkah-langkah non-militer. Bahkan, untuk kasus yang melibatkan Indonesia, seperti pada kasus Sipadan-Ligitan, dan Blok Ambalat, Indonesia tidak mengedepankan pendekatan militer untuk penyelesaian perselisihan. Ketika situasi politik dalam negeri memanas dengan situasi “perebutan” wilayah tersebut, pemerintah memilih penyelesaian melalui Pengadilan Mahkamah Internasional. Perselisihan Indonesia - Malaysia dalam Sipadan Ligitan pun pada akhirnya dimenangkan Malaysia.

Rekam jejak Indonesia sebagai mediator sebenarnya telah dimulai sejak inisiatif menyelenggarakan KAA dan aktif dalam GNB. Dua forum ini membawa Indonesia sebagai negara yang mampu mengumpulkan negara-negara yang memiliki perbedaan pandangan untuk memiliki kesepakatan melalui proses negosiasi. Dalam konteks KAA, Indonesia mampu mengumpulkan negara-negara dari Afrika dan Asia dengan variasi ideologi untuk menyepakati “perlawanan” terhadap penjajahan. Sedangkan dalam GNB, Indonesia berhasil membawa negara-negara non-blok untuk memediasi secara tidak langsung blok Barat dan blok Timur.

Dalam tulisan ini akan dibahas dua perbandingan cara Indonesia memediasi konflik, yaitu konflik Kamboja dan Konflik Laut Cina Selatan. Kedua konflik ini adalah konflik yang sangat rumit karena melibatkan tidak hanya negara di kawasan, tetapi juga melibatkan negara-negara di luar kawasan.

Dalam tabel di bawah ini digambarkan kedua konflik yang dihadapi oleh Indonesia.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Konflik Kamboja dan Konflik Laut**  
**Tiongkok Selatan**

<b>Keterangan</b>	<b>Konflik Kamboja</b>	<b>Laut Tiongkok Selatan</b>
<b>Pihak yang berperan</b>	Pemerintah jalur formal	Pemerintah jalur formal
	Pemerintah jalur non formal melalui JIM	Pemerintah jalur non formal melalui Workshop
<b>Posisi Indonesia</b>	Dicurigai karena memiliki kedekatan dengan Vietnam	Dicurigai memiliki kepentingan di perairan Natuna, memiliki kedekatan dengan Tiongkok
<b>Posisi ASEAN</b>	Indonesia dan Malaysia mendorong sentralitas ASEAN. Singapura dan Thailand menginginkan negara di luar kawasan terlibat	Indonesia dan Singapura mendorong sentralitas ASEAN. Vietnam dan Filipina menginginkan negara di luar kawasan terlibat
<b>Inisiatif</b>	Deklarasi Kuantan	Draft Nol
<b>Mediator lain</b>	Prancis	Kanada
<b>Kebijakan</b>	Keberlanjutan kebijakan dari Mochtar Kusumaatmadja ke Ali Alatas	Kebijakan terputus ketika pergantian Menlu
<b>Hasil</b>	Penyelesaian tetap	Siklus ketegangan

Diolah oleh Penulis

Dalam kedua konflik, Indonesia menggunakan dua jalur yaitu jalur pemerintah dan non pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam konflik Kamboja, Indonesia melakukan pendekatan informal dengan *Jakarta Informal Meeting* (JIM), sementara dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia menyelenggarakan workshop yang dihadiri oleh semua pihak yang berselisih. Dalam konteks jalur pemerintah, Indonesia tetap menggunakan jalur ini dengan mendorong sentralitas ASEAN.

Ketika terjadi *deadlock*, Indonesia mengajukan inisiatif-inisiatif. Dalam konflik Kamboja, Indonesia dan Malaysia mengajukan Deklarasi Kuantan. Sementara dalam Konflik Laut Cina Selatan, Indonesia mengajukan Draft Nol.

#### **D. PENUTUP**

Konsepsi peran Indonesia di Asia Tenggara dapat ditelusuri melalui rekam jejak politik luar negeri Indonesia dari masa Soekarno sampai Jokowi. Meskipun pemerintah memiliki prioritas politik luar negeri dalam setiap periode kepemimpinan, Indonesia tetap menempatkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang strategis, baik sebagai sarana untuk berperan dalam politik global atau untuk mencapai kepentingan domestik. Secara umum, ada tiga konsepsi peran Indonesia di Asia Tenggara yaitu bebas aktif, pemimpin di kawasan, dan mediator. Ketiga peran dapat diperankan sekaligus dalam satu periode kepemimpinan dan dapat pula hanya satu peran yang muncul.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Acharya, Amitav. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order*, 2<sup>nd</sup> Edition. New York: Routledge, 2011

Acharya, Amitav. *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*. Singapura: World Scientific Publishing, 2015

Gunadirja, et al. 1998. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1960-1965 (Buku IVB)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1998

Haryanto, Agus & Isman Pasha. *Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2016

Wuryandari, Ganewati et.al. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta & Jakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008

### **Jurnal**

Auliya, Putri & Yohanes Sulaiman, “*Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritime Fulcrum*” *Global Cakra & Strategis*. Thn 13, No 1 (2019): 79-90

Djelantik, Sukawarsini. “*Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan.*” *Global & Strategis*, Th. 10, No.2 (2016): 186-203

Emmers, Ralf. “*Indonesia’s role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership.*” *The Pacific Review*, Vol. 27, No. 4, (2014) 543-562

Laksmana, Evan A. 2011. “*Indonesia’s Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?*”. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 33, No. 2 (2011): 157-182

Nugroho, Bambang Wahyu. “*Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi*” *Jurnal Hubungan Internasional UMY*, Vol. 2, No 1 (2013): 75-82

Situmorang, Mangadar. “*Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi - JK*”. *Jurnal Hubungan Internasional UNPAR* Vol.11, No. 1 (2015): 67-85

Smith, Antony. 1999. “*Indonesia’s Role in ASEAN: The End of Leadership?*” *Contemporary Southeast Asia*, Volume 21, Number 2, Agustus (1999): 238-260

Tan, Paige Johnson. 2007. “*Navigating A Turbulent Ocean: Indonesia’s Worldview and Foreign Policy*”. *Asian Perspectives* Vol. 31, No. 3 (2007): 147-181

## Laporan dan Makalah

- Aggestam, Lisbet. 1999. "Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy". ARENA Center for European Studies Working Paper nomor 99/8, 1999. Dapat diakses Melalui : [http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenapublications/workingpapers/working-papers1999/wp99\\_8.htm](http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenapublications/workingpapers/working-papers1999/wp99_8.htm) yang diakses pada 20 April 2020
- Prihatyono, Agus. "Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia tenggara melalui *ASEAN Security Community*." Jakarta : Tesis FISIP UI, 2009. Dapat diakses melalui <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/120754-T%2025647-Peran%20Indonesia-Analisis.pdf> yang diakses pada 20 April 2020
- Thies, Cameron G. 2009. "Role Theory and Foreign Policy". Melalui <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf> yang diakses pada 20 April 2020 pukul 9:00
- Walker, Stephen G. 2013. "Binary Role Theory and Uncertainty Problem in International Relations Theory". Melalui <http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/walker.pdf> yang diakses pada 20 April 2020 pukul 09:00
- Weinstein, Franklin bernard. 1972. *The Uses of Foreign Policy in Indonesia*. Disertasi di Universitas Cornell. Disertasi dapat diunduh di proquest
- Wirayuda, Muhammad Hadianto. 2014. *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management*. London: Disertasi di London School of Economics and Political Science melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/46517769.pdf> yang diakses 20 April 2020

